

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

5.1. Kesimpulan

Setelah diadakan penelitian terhadap lingkungan perusahaan dan struktur jasa pendidikan sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa :

1. Intensitas persaingan program studi Sosiologi yang berada pada tahap pertumbuhan relatif baik dibanding pesaing yang ada. Posisi ini tentunya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang dimiliki Program Studi Sosiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Faktor-faktor internal tersebut berupa kekuatan dan kelemahan sebagai suatu tolak ukur dalam penentuan strategi bersaing perusahaan. Adapun kekuatan-kekuatan tersebut adalah :
 - a. *Brand image* yang dimiliki Universitas Atma Jaya Yogyakarta sangat kuat sehingga mendukung perumusan strategi bersaing yang lebih baik.
 - b. Kualitas produk dan pelayanan yang diakui.
 - c. Pemilikan teknologi informasi.
 - d. Penguasaan *market share* relatif cukup besar di DIY dibanding pesaing yang beroperasi pada program studi Sosiologi.
 - e. Dukungan keuangan untuk usaha operasional masing-masing program studi di UAJY relatif baik.
 - f. Memiliki tenaga pengajar/ SDM yang kompeten.

- g. Pengalaman dari dosen-dosen melalui UPT penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pengembangan produk.
- h. *Self belonging* yang tinggi dari para karyawannya.

Dan yang menyebabkan pertumbuhan program ini bersifat statis adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki popularitas terendah di antara seluruh program studi.
- b. Usaha pemasaran yang terbatas/kurang.
- c. Kebutuhan informasi global mahasiswa kurang.
- d. Ruang gelanggang mahasiswa yang sempit.
- e. Keasrian ruang kuliah
- f. Belum memiliki kode etik dosen.

Demikian juga posisi persaingan program ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya yang memberikan peluang dan ancaman terhadap program studi ini.

Peluang yang ada dalam lingkungan FISIPOL-Program Studi Sosiologi adalah:

- a. Jumlah pesaing di pasar sedikit
- b. Pasar yang masih menjanjikan
- c. Kerjasama dengan instansi-instansi/perusahaan di wilayah DIY ataupun di luar wilayah DIY.
- d. Persepsi yang timbul di masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi
- e. Kota Yogyakarta sudah dikenal di seluruh wilayah Indonesia sebagai kota pelajar, kota budaya dan kota tujuan wisata.
- f. Peluang dimasa mendatang dalam usaha sourcing dosen berkualitas yang lebih mudah.

Sedangkan ancaman yang menyebabkan pertumbuhan program ini lambat dibandingkan dengan program-program lain yang ada di lingkungan UAJY, sebagai berikut :

- a. Daya tarik program studi Sosiologi di tengah-tengah masyarakat kita tergolong rendah.
- b. Peraturan pemerintah yang memberikan legalitas bagi universitas untuk membuka program yang sama.
- c. *Bargaining power* dosen yang masih tinggi.
- d. Ancaman kemajuan teknologi pendidikan
- e. Ancaman globalisasi

Dari analisis lingkungan perusahaan diatas, diketahui bahwa Program Studi Sosiologi memiliki kekuatan diatas para pesaingnya. Dilihat dari pangsa pasar, program Sosiologi memiliki posisi persaingan yang relatif tinggi dibanding pesaing yang ada. Demikian halnya peluang pasar yang ada memberikan peluang bahwa program ini dapat bertumbuh seperti dengan program-program studi lain yang ada di lingkungan UAJY. Meskipun selama krisis ekonomi yang diasumsikan sebagai penyebab merosotnya jumlah mahasiswa untuk masuk perguruan tinggi bukanlah alasan program ini tidak diminati oleh masyarakat jika didukung program-program pemasaran yang agresif.

2. Dari analisis lima kekuatan persaingan dalam industri maka didapat hasil analisa industri program studi sebagai berikut :
 - a. Memiliki hambatan masuk yang tinggi
 - b. Ancaman produk pengganti tidak ditemukan
 - c. Kekuatan tawar menawar pembeli relatif rendah
 - d. Kekuatan tawar menawar pemasok adalah kuat.

e. Memiliki intensitas persaingan yang ketat.

Dari keseluruhan analisis, baik analisis dampak lingkungan internal/eksternal dan analisis struktur persaingan, dapat dirumuskan mengenai *key success factors* yang menjadikan keunggulan bersaing program studi Sosiologi UAJY yang selanjutnya dijadikan sebagai kerangka dalam penentuan strategi, yaitu :

1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memiliki nama yang baik dalam bidang jasa pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (*brand image*).
2. Kualitas produk dan pelayanan yang diakui.
3. Tenaga pengajar/ SDM yang dimiliki program studi Sosiologi adalah kompeten.
4. Penerapan teknologi informasi.

5.2. Saran

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dengan pihak manajemen FISIPOL-Program Studi Sosiologi selama penelitian ini, pada dasarnya strategi yang sudah berjalan selama ini sudah berfungsi seiring dengan daya tarik yang dimiliki program studi ini dibanding dengan program-program studi lain. Terlihat hingga saat ini Program Studi Sosiologi memiliki rata-rata penguasaan pangsa pasar terbesar dibanding dengan kedua pesaingnya (ISIPOL “Kartika Bangsa”, Universitas Widya Mataram). Meskipun demikian masih banyak pencapaian strategi yang belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Program Studi Sosiologi.

Adapun tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh Program Studi Sosiologi adalah melahirkan sarjana-sarjana :

- 1) Memiliki kemampuan analitis kritis, melalui pengembangan kemampuan teoritik konseptual dan keluasan wawasan.

- 2) Memiliki wawasan praktis yang kuat melalui pengembangan profesionalisme yang bersumber didalam pemahaman kerangka teoritik konseptual tersebut.
- 3) Memiliki kepedulian terhadap lingkungannya, (sebagai pengungkapan idealisme, komitmen moral, etika dan keberpihakan kepada yang lemah).

Oleh karena itu strategi yang disarankan oleh penulis untuk diterapkan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas program studi yang memiliki daya saing seperti program-program studi lain yang ada di UAJY sehingga mendukung ke arah masyarakat yang lebih luas. Peningkatan kualitas ini mendapat dukungan dari staf dosen berkualitas (dosen tetap) yang dimiliki program ini dan pengalaman-pengalaman dari dosen-dosen melalui berbagai penelitian dan pengabdian.
- b. Melakukan usaha pemasaran yang lebih agresif melalui penetrasi pasar intensif seperti promosi ke sekolah-sekolah SLTA, seminar ilmiah, lokakarya, studium general, dan debat ilmiah (diskusi). Usaha ini dilakukan dengan mengundang tokoh-tokoh terkenal di bidang sosiologi. Tujuan adalah disamping mempertahankan pangsa pasar lokal mampu memperluas pasar ke arah yang lebih luas, juga sebagai strategi yang tepat untuk meningkatkan adaptasi (daya tarik) program studi Sosiologi ditengah-tengah kampus maupun masyarakat luas.
- c. Memperluas daerah pemasaran ke wilayah domestik yang lebih luas. Strategi ini berangkat dari kekuatan yang dimiliki program ini seperti *brand image* yang kuat, tenaga pengajar/SDM kompeten, pengalaman-pengalaman para dosen yang aktif di Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Masyarakat. Strategi ini didukung kerjasama yang dimiliki universitas maupun program studi yang kuat serta ditopang latar belakang kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, kota budaya dan kota wisata.

Manfaat dengan strategi ini dapat memperkuat *barrier to entry* perguruan-perguruan tinggi lain untuk membuka program studi Sosiologi.

- d. Merancang sistem pendidikan yang memiliki daya saing dan daya tarik sekaligus keunggulan bersaing dengan orientasi menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi terhadap setiap perubahan lingkungan masyarakat.
- e. Peningkatan produktivitas dosen melalui pemberdayaan seluruh sumberdaya yang dimiliki. Tujuannya untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang ada di lingkungan program studi Sosiologi seperti daya tarik program yang lemah, *bargaining power* dosen dan ancaman kemajuan teknologi pendidikan dewasa ini.
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai bagi mahasiswa (seperti menciptakan kenyamanan ruang kuliah baik layout maupun display, menyediakan gelanggang mahasiswa, pemberdayaan laboratorium yang ada) untuk memungkinkan mahasiswa melakukan proses sosialisasi masyarakat kemahasiswaan dan akademik yang sudah terprogram dalam kampus.
- g. Pemanfaatan teknologi informasi seperti jaringan internet untuk menciptakan wawasan global mahasiswa. Kecepatan memperoleh informasi dalam era informasi dewasa ini merupakan salah satu *competitive advantage* yang bisa dimiliki mahasiswa dan program studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- David, R. Fred., (1986), *Fundamentals of Strategic Management*, London: Merrill Publishing Company.
- Hill, C. W. L dan Jones, C.R., (1992). *Strategi Management Theory: An Integrated Approach*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Hunger, J.D. and Wheelen, T.L. (1996), *Strategy Management*. Fifth Edition. New York: Addison-Wesley Publishing Company.
- Hax, A.C and Nicolas, S. Majluf, (1991), *Strategi Management : Text and Cases*. New York: John Wiley and Sons.
- Hill, W Charles and Jones, R Gather. (1992), *Strategic Management*. New York: Addison-Wesley Publishing Company.
- Hitt, A. Michael, Ireland, R.D and Hoskisson, E. Robert, (1997), *Strategic Management: Competitiveness and Globalization*. West-Publishing Company. Inc.
- Jauch, L. R. dan Glueck, W, F., (1993). *Business Policy and Strategic Management*. New York: Mc Graw Hill.
- Kotler, Philip, (1994), *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusumadmo, (1999), *Laporan Tahunan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam DIES NATALIS XXXIV*, Yogyakarta.
- Mintberg, H. and Quinn, J.B. (1991), *The Strategy process: Concepts, Context, Cases*, Second Edition. New York: Englewood Cliffs.
- Porter M. E., (1993). *Keunggulan Bersaing*. Terj. Agus Maulana. Penerbit: Erlangga, Jakarta.
- Porter, Michael E., (1997), *Strategi Bersaing: Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing*, Jakarta :Penerbit Erlangga.
- Rangkuti, Freddy, (1997). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Reksohadiprojo, S. (1993), *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: BPFE.

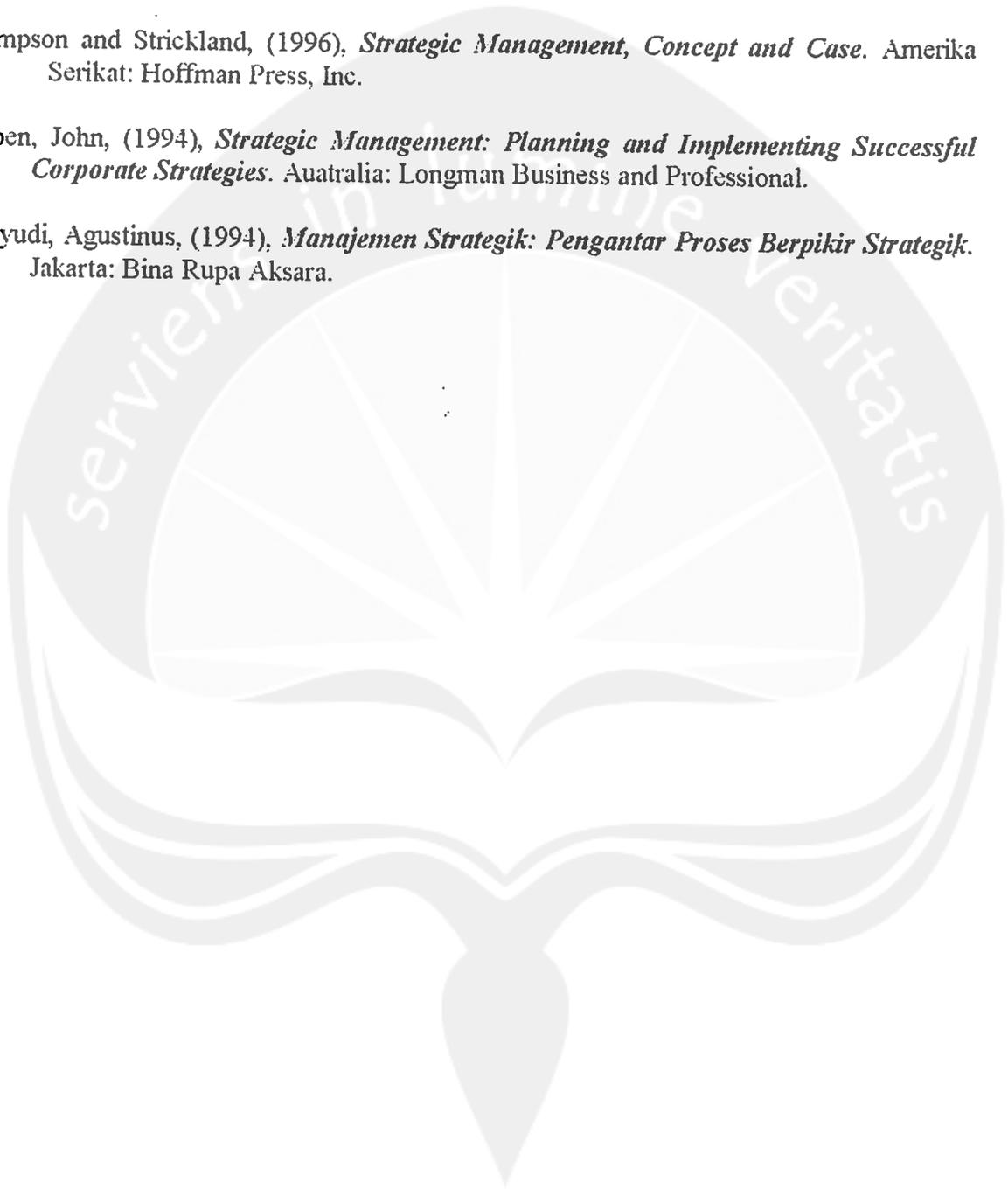
Rowe, Alan J., et al., (1994), *Strategic Management: A Methodological Approach*, Fourth Edition. USA: Addison-Wesley Publishing Company.

Suwarsono, (1996), *Manajemen Strategik: Konsep dan Kasus*, Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Thompson and Strickland, (1996), *Strategic Management, Concept and Case*. Amerika Serikat: Hoffman Press, Inc.

Viljoen, John, (1994), *Strategic Management: Planning and Implementing Successful Corporate Strategies*. Australia: Longman Business and Professional.

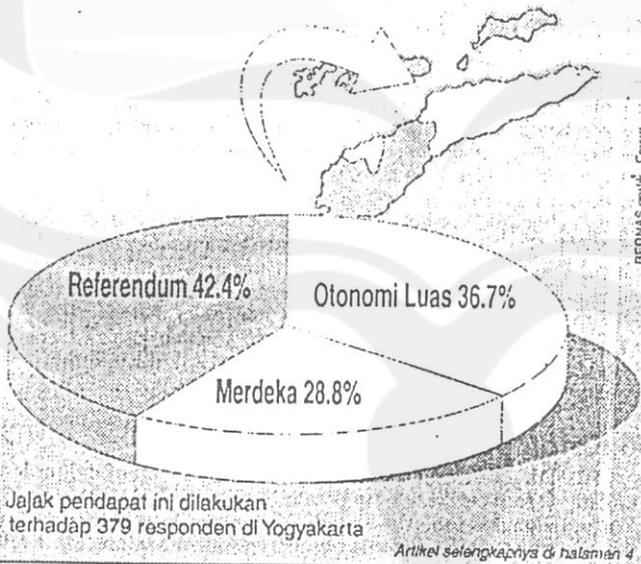
Wahyudi, Agustinus, (1994), *Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Strategik*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.



BERNAS, 3 Februari 1999, hal. 1

JAJAK PENDAPAT LITBANG BERNAS dan PRODI SOSIOLOGI FSIP UAJY

Bagaimana penyelesaian terbaik bagi
persoalan Timor Timur?



Sikap Masyarakat terhadap Permasalahan Timor Timur

BINCANGAN masalah Timor kembali mencuat nu-kaan setelah peme-Indonesia memberikan tif untuk melepas promuda ini apabila pilihan penyelesaian masalah Timor dengan pemberian i seluas-luasnya ditolak. an tersebut memang mengejutkan, bukan bagi rakyat Indonesia

mempunyai tingkat pendidikan tamat SLTA (50,4 persen). Sisanya tersebar dalam tingkat pendidikan tamat SLTP (16,4 persen), tamat perguruan tinggi (13,7 persen), tamat akademi (10,8 persen), dan tamat SD (7,9 persen). Sedang gambaran tentang jenis kelamin responden terbagi dalam 57,5 persen laki-laki dan 42,5 persen perempuan. Bagaimanakah penyelesaian

mur (42,5 persen). Terlihat pula jumlah yang relatif besar dari responden yang menganggap pemberian otonomi luas sebagai cara terbaik (36,7 persen), sedangkan responden yang menganggap merdeka sebagai alternatif terbaik hanya sekitar 20,8 persen

Mungkin sangat besarnya jumlah responden yang menganggap referendum sebagai alternatif terbaik berkaitan dengan keingintahuan mereka akan keinginan rakyat Timor Timur yang sebenarnya untuk bergabung atau memisahkan diri setelah selama lebih dari 22 tahun "diintegrasikan" ke wilayah Indonesia.

Hal menarik dari jajak pendapat ini adalah tokoh Timor Timur yang dianggap paling dapat menjadi ujung tombak penyelesaian masalah Timor Timur. Uskup Belo ternyata menduduki ranking tertinggi (55,7 persen), kemudian disusul oleh Xanana Gusmao (24,3 persen). Sedang tokoh-tokoh lainnya mempunyai persentase relatif kecil (lihat Tabel 1).

Berdasarkan pendapat para responden tentang lembaga kunci yang dianggap paling dapat menyelesaikan masalah di Timor Timur, sebagian besar responden menyebutkan bahwa masya-

rakat Timor Timur sendirilah yang dapat menyelesaikan masalah mereka (54 persen). Sedang yang menyebut PBB sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan masalah Timor cukup besar pula, yaitu 33,3 persen. Terdapat indikasi menarik tentang rendahnya persentase yang menyebut bahwa pemerintah Indonesia (11,9 persen) ataupun pemerin-tah Portugal (0,8 persen) sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan masalah Timor Timur.

Permasalahan Timor Timur bukan persoalan elite politik semata, tapi persoalan rakyat. Seperti yang terlibat dalam Tabel 2, persentase terbesar terlihat pada penyelesaian terbaik melalui referendum dengan melibatkan lembaga kunci masyarakat Timor Timur sendiri.

Agaknya pemerintah Indonesia harus membuka diri untuk menyelesaikan masalah Timor Timur secara arif dengan memperhatikan keterlibatan rakyat Timor Timur yang selama ini selalu "dibungkam" dan mencoba mem-berikan wewenang kepada PBB untuk ikut terlibat langsung dalam menangani masalah Timor Timur.

(Prodi Sosiologi Fisip UAJY/Litbang Bernas)

Tabel 1

Tokoh Kunci Timor Timur dalam Penyelesaian Masalah

kunci	Frekuensi	Persentase
Belo	211	55,7
Soares	33	8,7
V. Carascalao	17	4,5
a Gusmao	92	24,3
is Amara	11	2,9
a	4	1,1
menjawab	11	2,9
I	379	100,0

raga bagi rakyat Timor sendiri. Hal ini membawa nsi runtuhnya kons-onstruksi yang selama ptakan oleh pemerintah mem-bingkai *image* rakyat ia sendiri tentang berba-icam kenyataan yang terjadi di Timor Timur. up menarik memang elihat sikap masyarakat mor Timur dalam me-pipersoalan Timor Timur adanya pernyataan ntah tentang kemung-ntuk melepas propinsi a ini.

iple yang diambil dalam ndapat ini berjumlah 379 en. Pengambilan *sample* an di wilayah Yogyakarta *stratified random sam-ajak* pendapat ini tidak udkan untuk mengetahui aspirasi masyarakat, anya untuk memperjelas an tentang arah kecen-un sikap masyarakat In- gaimana besar responden

terbaik bagi masalah Timor Timur menurut para responden? Sebagian besar responden meng-anggap bahwa referendum merupakan cara yang terbaik bagi penyelesaian masalah Timor Ti-

Tabel 2

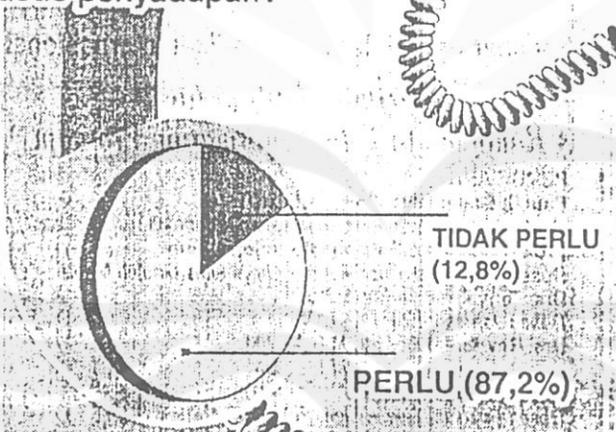
Hubungan Penyelesaian Terbaik dan Lembaga Kunci

Penyelesaian Terbaik	Lembaga Kunci				
	PBB	Pemerintah Indonesia	Pemerintah Portugal	Masyarakat Timtim	Total
Otonomi Luas	49 (13,0%)	17 (4,5%)	1 (0,3%)	72 (19,0%)	139 (36,8%)
Merdeka	30 (7,9%)	6 (1,6%)	2 (0,5%)	40 (10,6%)	78 (20,6%)
Referendum	47 (12,4%)	22 (5,8%)	-	92 (24,3%)	161 (42,6%)
Total	126 (33,3%)	45 (11,9%)	3 (0,8%)	204 (54,0%)	378 (100,0%)

BERNAS, 1 Maret 1999, hal. 1

JAJAK PENDAPAT LITBANG BERNAS dan PRODI SOSIOLOGI FSIP UAJY

Perluah Habibie dan Ghalib
mempertanggungjawabkan
kasus penyadapan?



Bernas Opak. 0010

Jajak pendapat dilakukan terhadap
327 responden di Yogyakarta

Masyarakat Tuntut Pertanggungjawaban Habibie-Ghalib

RAMAINYA obrolan banyak orang baik di tingkat elit politik maupun masyarakat umum mengenai tersebar luasnya kaset pembicaraan Presiden Habibie-Jaksa Agung Andi M. Ghalib semakin seru saja. Berita perlunya Presiden Habibie untuk mempertanggungjawabkan kasus tersebut, moga-moga saja mampu menjadi angin segar dalam penyelesaian kasus yang tidak biasa ini. Terlebih demi semakin tegaknya nilai kebenaran di negeri ini. Atau, barangkali kasus ini akan menyusul kasus-kasus lain yang semakin menumpuk yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah. Bentak dengan alasan apa lagi, kasus tersebut kemudinn ditutup dan dianggap selesai tanpa pernah berhasil dituntaskan secara utuh sesuai fakta yang terjadi.

Melalui jajak pendapat *Prodi Sosiologi UAJY* dan *Litbang Bernas* ini, dari 327 responden, sebanyak 285 (87,2 persen) responden menjawab perlunya Habibie dan Andi Ghalib mempertanggungjawabkan kasus tersebut, sedang 42 (12,8 persen) lebih memilih tidak perlu. Besarnya jarak persentase di atas, jelas menunjukkan bahwa masyarakat menuntut Habibie untuk mempertanggungjawabkan soal kebenaran dari kasus tersebut.

Pro dan kontra Peta persoalan politik di tanah air semakin marak setelah kasus penyadapan pembicaraan Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi Ghalib menyebar di masyarakat. Seperti biasa tumbuh suara pro dan kontra. Kalangan yang setuju menggunakan argumentasi bahwa kasus penyadapan sah-sah saja sebab menyangkut kepentingan rakyat banyak. Pandangan ini didasarkan pada materi pembicaraan antara Habibie dan Ghalib, yaitu menyangkut pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang secara khusus terkait dengan soal pengusutan mantan presiden Soeharto. Kalangan kontra lebih menekankan dimensi etis, menyangkut pembocoran rahasia negara dan pelanggaran hak-hak pribadi.

Lepas dari arus perbincangan yang setuju dan mengutuk, jajak pendapat ini berusaha mengungkap respon masyarakat "arus bawah". Dengan demikian, akan berusaha keluar dari arus utama perbincangan di media massa, yang cenderung menempatkan para elite intelektual

Sambungan dari hal. 1

dan politik di panggung media sebagai penentu arah. Jajak pendapat ini dilakukan terhadap 327 responden yang tinggal tersebar di Yogyakarta. Metode yang digunakan tetap seperti jajak pendapat terdahulu, menggunakan *stratified random sampling*, sehingga keragaman jawaban diharapkan akan muncul. Tabel 1 dapat menunjukkan identitas responden yang bervariasi. (*)

Bersambung ke hal. 11 kol. 1

Baca juga di halaman 4

WACANA

Skandal Bank Bali:

Menutup Borok Sesama

Pengantar redaksi
Harian *Bernas* bekerjasama
dengan Program Studi Sosiologi
Fisip Universitas Atmajaya
Yogyakarta telah melakukan
jajak pendapat berkaitan
dengan skandal Bank Bali.
Berikut ini, adalah hasil jajak
pendapat termaksud.

RESTRUKTURISASI utang
oleh Badan Penyehatan Per-

mengemuka tak memiliki ujung
penyelesaian, keengganan melaku-
kan penyelidikan yang serius,
dan pada sisi lain juga ambisi dan
persaingan demi suatu kepen-
tingan politik kelompok tertentu.
Sehingga setiap kasus muncul
sebagai persoalan multifaset dan
multidimensional yang men-
cakup kompleksitas ketidak-
berdayaan.

Berbagai alasan terjadinya
kasus Bank Bali menurut sebagi-

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pendidikan Responden	Jenis Kelamin Responden		Total
	Laki-laki	Perempuan	
SD Sederajat	14 (4,7)	7 (2,3)	21 (7,0)
SMP Sederajat	15 (5,0)	13 (4,3)	28 (9,3)
SMU Sederajat	75 (25,0)	78 (26,0)	153 (51,0)
Akademi/Mahasiswa/PT/Universitas	46 (15,3)	46 (15,3)	92 (30,7)
Pasca Sarjana	4 (1,3)	2 (0,7)	6 (2,0)

bankan Nasional (BPPN) menda-
ptakan tudingan, karena
cenderung merugikan para de-
bitur (12/7/1999). Sebulan kemu-
dian keraguan terhadap BPPN
makin terasak yang menyangkut
kredibilitasnya yang selama ini
belum teruji, pasalnya aset rak-
sasa perusahaan swasta yang
mencapai 75 persen dari total
aset nasional sekarang ini di-
kuasai oleh pemerintah, bahkan
sedikitnya 80 persen perbankan
nasional sedang di pelukan pe-
merintah.

Di tangan pemerintahan
yang tidak kredibel, aset raksasa
ini akan menjerumuskan bangsa
ini ke dalam keterpurukan eko-
nomi yang makin parah. Skand-
al Bank Bali bagi sebagian
rakyat merupakan bukti ini.

KREDIBILITAS pemerintah
transisi kembali dipertanyakan,
terlihat dalam setiap kasus yang

an besar responden menyadari
bahwa kasus termaksud merupa-
kan kasus yang mengandung
kompleksitas, berkaitan dengan
kepentingan kelompok elit politik
tertentu (34,7 persen) khususnya
perebutan kursi kepresidenan!

Tetapi terkait dengan peran
Setyo Novanto, wakil bendahara
Partai Golkar, serta diperoleh-
nya biaya penagihan sebesar
60,35 persen ke rekening PT Era
Giat Prima, maka responden
sebesar 24,0 persen menyata-
kan bahwa kasus ini terkait de-
ngan strategi partai politik besar
tersebut.

Sebanyak 26,7 persen res-
ponden menyatakan bahwa pe-
merintah transisi belum mampu
menghilangkan praktek korupsi
yang dilakukan pejabat negara,
tereleasennya transfer ke bebera-
pa rekening pejabat menjadi alasa-
nnya. Sebihnya memandang
sebagai bentuk persaingan bis-

Tabel 2. Alasan Terjadinya Kasus Bank Bali

1. Apakah yang terjadi di balik kasus yang menghimpit Bank Bali ?		
Alasan	Frekuensi (org)	Persentase %
Persaingan Bisnis Perbankan	32	10,7
Berkaitan Dengan Partai Politik Besar	72	24,0
Kepentingan elit Politik	104	34,7
Praktek korupsi Pejabat Negara	80	26,7
Tidak Tahu	12	4,0
Total	300	100,0

Tabel 3. Kredibilitas Pemerintahan Transisi

3. Apakah kasus Bank Bali akan menurunkan citra pemerintahan transisi yang dipimpin Habibie ?		
	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	257	85,7
Tidak	15	5,0
Tidak Tahu	28	9,3

Tabel 4. Kredibilitas Otoritas Moneter

4. Apakah kasus ini menunjukkan lemahnya tanggung jawab dan tidak berwajibnya Otorita moneter ?		
	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	228	76,0
Tidak	26	8,7
Tidak Tahu	46	15,3

nis perbankan (10,7 persen) dan
sebagian tidak tahu menahu de-
ngan kasus ini (4,0 persen)

Keterlibatan Habibie dan
beberapa pejabat otoritas mone-
ter diduga oleh banyak masya-
rakat karena: Pertama, proses
pengurusan dan penagihan yang
cepat. Kedua, besarnya komisi
penagihan. Ketiga, menyebarnya
transfer ke sejumlah reke-
ning korupsi dan kolusi dan ne-
potisme. Sejumlah responden
memberikan keyakinan bahwa
Habibie terlibat dalam kasus
skandal Bank Bali (79 persen)
dan sebagian responden sebany-
ak 5 persen memberikan ke-
mungkinan tidak terlibatnya o-

rang nomor satu di negeri ini,
karena akan ditunjukkan reke-
ningnya yang tidak pernah ke-
cipratan uang haram ini.

Sedangkan responden yang
tidak tahu menahu akan keterli-
batan Habibie mencapai 16 persen.

IMPLIKASI keterlibatan ini
adalah makin tidak dipercayai-
nya dan menurunnya citra kepe-
mimpinan nasional. Sebesar 85,7
persen responden menyatakan
rendahnya kredibilitas Habibie.
Bahkan otoritas moneter ditu-
ding memiliki tanggung jawab
dan kewibawaan yang rendah
untuk menyelamatkan aset na-
sional (76 persen). (Lihat Tabel 3
dan Tabel 4).

Konsentrasi aset yang besar di tangan pemerintahan yang lalim akan mendorong semakin parahnya kondisi dan pemulihan ekonomi dan hilangnya sumber daya dan rakyatlah taruhannya.

Keraguan masyarakat untuk menuntaskan kasus ini makin besar sejalan dengan rendahnya tanggung jawab pemerintah. Terlihat bahwa responden tidak memiliki keyakinan bahwa pemerintahan yang sekarang akan menuntaskan kasus BB, yakni 62 persen. Bahkan mereka menduga bahwa rezim akan menuntaskan kasus ini dengan *melaunching* kasus lain (48,6 persen) sebagai persoalan yang seolah lebih pelik, seperti: isu pengunduran Bambang Subianto dan Ginanjar Kartasasmita hari Senin (30/8) lalu, rencana pengumuman kasus mantan presiden sebagai terdakwa, serta bentuk-bentuk *buying time* lainnya.

Upaya mengambangkan kasus sebagaimana terjadi pada banyak kasus sebelumnya, dipercayai oleh 20,9 persen responden sebagai cara pemerintahan sekarang mengatasi masalah ini, didukung intrik-intrik politik istana/elit lainnya dan melakukan teror-teror kepada semua pihak yang berusaha mengungkapnya.

AKHIRNYA, sebagian besar responden memberikan arahan bahwa sebagai langkah penyelesaian tidak bisa lagi diserahkan pada pemerintahan sekarang. Bahkan responden menyarankan adanya keharusan mundur dari jabatan (66 persen), sebagai langkah taktisnya melakukan pergantian rezim dan menuju pemerintahan baru yang bersih (*clean and new government*) mencapai 85 persen dari total responden (lihat Chart 3 dan Chart 4). Jika tidak, maka pemerintahan sekarang hanya akan menutup borok sesama dan kroni-kroninya, serta ngotot untuk mempermainkan nasib rakyat! Rakyat kapok boleh mogok!

Penyadapan dan Persoalan Etika Politik

PERSOALAN sadap-menyadap bagi masyarakat bukanlah barang aneh. Mereka percaya bahwa aktivitas sadap-menyadap, suka atau tidak suka, telah hadir dalam dunia kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh sikap kebanyakan responden (52,3 persen) yang menyatakan bahwa penyadapan telepon adalah hal biasa yang terjadi di masyarakat.

Kenyataan yang sering dihadapi dan dirasakan tersebut menyebabkan masyarakat cenderung melihat esensi atau materi pembicaraan penting untuk diketahui. Implikasinya, tidaklah janggal jika mayoritas responden menyatakan setuju jika pembicaraan Presiden Habibie dan Jaka Agung Ghalib disebarluaskan.

Responden yang mengungkapkan persetujuannya sebanyak 74,9 persen dan yang tidak

narnya. Hal ini mengindikasikan persoalan apa?

SELISIH pendapat yang relatif kecil tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat, yang diwakili para responden, lebih tertarik melihat kasus penyadapan tersebut pada soal penyebarluasan dan latar belakangnya, bukan pada soal-soal pembocoran rahasia negara atau etika jurnalistik. Dalam artian ini masyarakat sesungguhnya telah mempersoalkan etika politik yang sesungguhnya.

Retorika politik yang ditampilkan para politikus di panggung media massa tak ubahnya sandiwara, di balik panggung politik tersebut masyarakat cukup tahu bahwa itu tak lebih dari sekedar urusan kepentingan kelompok demi ambisi politik. Para responden tidak lagi butuh silat lidah atau bahkan kot-

disebabkan oleh pelanggaran etika politik dan tetek bengeknya, tetapi lebih disebabkan "belang" politiknya terbongkar, sehingga mereka yang duduk di pemerintahan khawatir legitimasinya tambah ambruk di mata rakyat.

Pertimbangan-pertimbangan seperti di atas menyebabkan masyarakat menuntut bahwa Presiden Habibie dan Jaka Agung Andi Ghalib perlu mengklarifikasi atau bahkan mempertanggungjawabkan materi pembicaraan dalam kaset rekaman tersebut. Pertanggungjawaban tersebut penting karena masyarakat akan mengetahui seberapa jauh kebenaran isi pembicaraan. Hal ini mengandaikan juga bahwa masyarakat merindukan adanya transparansi dalam pemerintahan.

Personalan *clean government* (pemerintahan yang bersih) kiranya menjadi faktor pertanggungjawaban bagi penyelenggaraan negara oleh aparatnya. Jika personalan transparansi ini tidak pernah diupayakan oleh pemerintah, niscaya masyarakat tetap tidak percaya akan segala omongan pejabat, sehingga tidak bisa disalahkan jika masyarakat selalu "membaca" di balik segala retorika politik. Karena itu, semakin gencar akrobat politik dimainkan, semakin yakin pula masyarakat bahwa hal itu bohong. Masyarakat, mulai dari pegawai negeri sipil/ABRI, pegawai swasta, sampai pelajar dan mahasiswa tetap menuntut Habibie dan Ghalib.

nimpikan adanya etika berpolitik yang berlandaskan kendilan dan kejujuran. Harapan ini tampak ketika mereka dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan menyangkut cara-cara penyadapan. Melihat kasus penyebaran pembicaraan Habibie dan Ghalib, masyarakat tetap tidak setuju jika hal itu dilakukan dengan cara menyadap. Sebagian besar responden (59,6 persen) masih setuju bahwa bentuk-bentuk penyadapan merupakan pelanggaran hak pribadi. Sedangkan sejumlah 40,1 persen responden menganggap bahwa hal itu bukan pelanggaran. Hanya sejumlah 0,3 persen responden yang menjawab tidak mengetahui persoalan tersebut.

Sikap para responden yang menolak cara-cara penyadapan semakin kelihatan, meskipun penyadapan digunakan untuk pengembangan kehidupan demokrasi. Sebanyak 57,5 persen responden tetap menyatakan ketidaksetujuannya atau tidak bisa mentolerir. Sikap responden tersebut, ternyata, tidak berkaitan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki (lihat tabel 4). Tetapi, perlu pula menyimak suara-suara yang menyatakan bahwa penyadapan bisa ditolerir, terlihat di tabel bahwa antara yang tidak mentolerir (57,5 persen) dan mentolerir (41,8 persen) tidaklah sangat jauh rentangnya. Apakah hal ini menunjukkan bahwa etos hukum kita juga lemah?

Jikalau etos hukum, di mana masyarakat berusaha memba-

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
Tamat SD	24	7,3
Tamat SLTP	36	11
Tamat SLTA	170	52
Tamat D3	37	11,3
Sarjana	60	18,3
Jumlah	327	100

setuju sebanyak 25,1 persen. Apa yang menjadi alasan sehingga mayoritas responden bersikap setuju? Pertanyaan mengenai latar belakang penyebaran kaset rekaman dapat dijadikan petunjuk argumentasi mereka (lihat tabel 2). Sebagian besar responden melihat bahwa penyebarluasan tersebut lebih didasarkan pada motif kepentingan kelompok politik yang bersaing atau berusaha menjatuhkan lawan-lawan politiknya.

Namun, perlu juga mencermati sikap lain responden yang melihat bahwa penyebarluasan tersebut merupakan upaya pengungkapan fakta yang sebe-

bah para politikus tentang etika bernegara, namun mereka justru mempercayai bahwa materi pemberitaan yang digulirkan media merupakan fakta yang sesungguhnya terjadi, pemerintah tidak serius dalam pemberantasan kasus-kasus KKN.

Penyebaran informasi tersebut menjadi menarik bagi masyarakat karena memberikan peluang bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana keseriusan pemerintah membangun negeri ini. Dari titik ini kita juga bisa membaca dengan tafsir terbalik, bahwa ributnya elit politik yang berdebat tentang kasus penyadapan bukanlah

Tabel 2. Latar Belakang Penyebarluasan

Apa yang melatarbelakangi penyebaran kaset rekaman tersebut?	Persentase (%)
1. Demi kepentingan salah satu kelompok	52,3
2. Pengungkapan fakta yang sebenarnya	47,7

Tabel 3. Pekerjaan dan Tuntutan Pertanggungjawaban

Pekerjaan	Perlu Mempertanggungjawabkan	
	Ya	Tidak
PNS/ABRI	35 (10,7%)	10 (3,1%)
Pegawai Swasta	78 (23,9%)	16 (4,9%)
Wiraswasta	71 (21,7%)	5 (1,5%)
Pelajar/Mahasiswa	62 (19,0%)	6 (1,8%)
Lainnya (Ibu RT, Buruh)	39 (11,9%)	5 (1,5%)

memberikan pertanggungjawaban (lihat tabel 3).

MESKI akrobat-akrobat politik sering dimainkan oleh para elite politik, masyarakat sesungguhnya masih menyimpan harapan tentang etika politik yang sesungguhnya, paling tidak masyarakat masih me-

ngun nilai-nilai dan kepercayaan pada hukum semakin melampaui, maka niscaya ke-*chaos*-an akan semakin menghebat di masa-masa yang akan datang. Akhirnya, jawaban-jawaban yang diberikan oleh para responden, yang dianggap mewakili kecenderungan masyarakat, dapatlah disebut sebagai "lam-

Tabel 4. Pendidikan dan Toleransi Penyadapan

Pendidikan	Apakah bisa ditolelir?		
	Ya	Tidak	Tidak Tahu
Tamat SD	7 (2,1%)	17 (5,2%)	0
Tamat SLTP	18 (5,5%)	18 (5,5%)	0
Tamat SLTA	73 (22,3%)	95 (29,1%)	2 (0,6%)
Tamat D3	18 (5,5%)	19 (11,9%)	0
Sarjana	21 (6,4%)	39 (11,9%)	0

pu peringatan” bagi para elite politik untuk semakin memperhatikan etika politik. Jika ini tidak diperhatikan, pendidi-

kan politik yang digembar-gemborkan akan semakin jauh dari kenyataan. Masyarakat yang masih

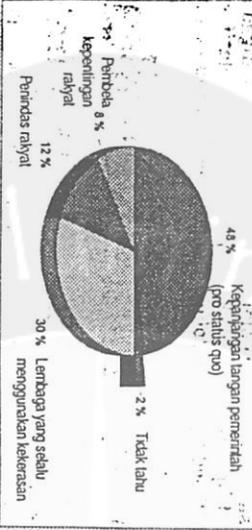
mengharapkan adanya permainan politik yang bersih, jujur dan masih memiliki optimisme etos hukum, akan tergerus kepercayaannya jika para elite politik bertindak seenak perutnya da-lam bermain politik. Segala pertikaian politik hendaknya tetap dibingkai dalam etika politik yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan tidak melanggar hak-hak asasi dengan seenaknya.

(Prodi Sosiologi Fisip
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta/Litbang
Bernas)

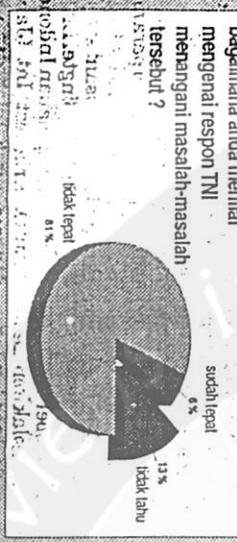
"POLLING" KERJASAMA PRODI SOSIOLOGI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA DENGAN HARIAN BERNAS

TEMA : TNI dan KEKERASAN

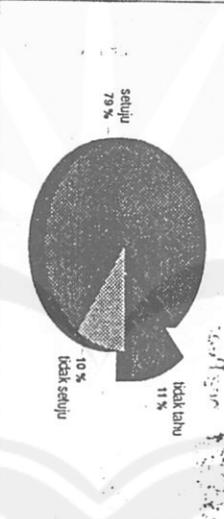
Menurut pendapat anda, bagaimana sikap TNI selama ini ?



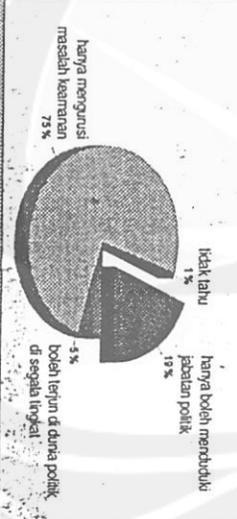
Mejliah serangkaian kerusuhan, demonstrasi, dan tindak kekerasan baru-baru ini, bagaimana anda menilai mengenai respon TNI menangani masalah-masalah tersebut ?



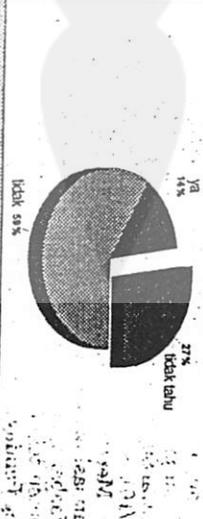
Apakah anda setuju fungsi sosial politik TNI (fungsi kedua dwifungsi ABRI) dibubut ?



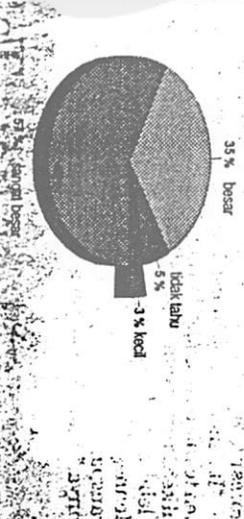
Menurut anda, bagaimana TNI menjalankan fungsinya untuk sekarang ini ?



Apakah anda setuju dengan garis kebijakan dan langkah-langkah yang diambil Menhankam Panglima TNI Jend. TNI Wiranto selama ini ?



Bagaimana kecukupan TNI sampai dengan sekarang ini ?



Jumlah responden (n) : 297, disenggarakan terhitung penduduk di DIY dan sekitarnya tanggal 1-3 Oktober 1999

Politik, Tabloid, dan Masyarakat

JATUHNYA Soeharto agaknya telah menyemangati banyak pihak untuk mengisi pasca Orde Baru dengan "banjir" penerbitan pers. Betapa tidak. Dibandingkan dengan semasa 3 dasawarsa pemerintahan zaman Orba yang mengeluarkan 255 surat izin penerbitan pers, masa pemerintahan era Reformasi yang belum genap 1 tahun ini sudah mengeluarkan sekitar 400 surat izin penerbitan pers. Meskipun barangkali belum semuanya beredar, tetapi jumlah itu tentu sangat fantastis, mengingat penerbitan pers saat ini berhadapan dengan krisis ekonomi yang menyesak. Namun, peningkatan tersebut setidaknya memberi peluang kepada masyarakat untuk menentukan banyak pilihan akan kebutuhan informasi.

Pers, sebagaimana media massa, berfungsi sebagai ruang publik, yakni ruang dialog bagi rakyat dan kanal komunikasi untuk mewujudkan struktur dan sistem pemerintahan yang ideal. Hal ini baru dapat terwujud bila media mendapat jaminan untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Terutama, dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara.

Pers, juga media massa lain, tidak dapat eksis tanpa khalayak. Karenanya mengetahui bagaimana respon khalayak atas pemberitaan di media tersebut ada-lah satu hal menarik untuk dilakukan. Terutama, sebagai upaya untuk mencer-mati bagaimana media tersebut berperan sebagai ruang dinlog.

Jajak pendapat ini melibatkan sejumlah 449 responden, diambil secara acak (*stratified random sampling*) di wilayah Yogyakarta, yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kecenderungan media sebagai kanal komunikasi politik di Indonesia. Tabloid dipilih dalam jajak pendapat ini karena jumlahnya menjamur.

Sebagian besar responden mempunyai tingkat pendidikan tamat SMTA (64,6 persen). Sisanya tersebar dalam tamat Sarjana (19,8 persen), tamat Akademi (14,7 persen), tamat SMTP (8,7 persen), dan tamat SD (2,2 persen). Pelajar/mahasiswa merupakan jumlah terbesar dari responden (28,3 persen), diikuti oleh pegawai swasta (26,9 persen), wiraswasta (19,2 persen), ABRI/PNS (12 persen), dan lainnya (13,6 persen). Sedangkan

gambaran jenis kelamin responden terbagi dalam 64,4 persen laki-laki dan 35,6 persen perempuan.

Tabloid yang dibaca responden dalam satu bulan terakhir sebagian besar berjumlah 1-2 tabloid (56,1 persen). Mereka yang membaca 3-4 tabloid ada sebanyak 32,2 persen, dan 11,6 persen responden sisanya membaca lebih dari 4 tabloid. Umumnya, dari berbagai topik berita, responden menyukai politik untuk dibaca (64,1 persen). Selebihnya beragam antara ekonomi (13,8 persen), hobi (12,1 persen), hiburan (7 persen), dan informasi (3 persen).

Isu-isu seperti korupsi, kolusi dan nepotisme tampaknya tidak lagi menjadi perhatian utama, karena hanya dibaca oleh sebanyak 19,8 persen responden. Sebaliknya, intrik-intrik seputar persaingan antar elit-elit politik menjadi isu yang paling banyak dibaca oleh responden (44,7 persen). Isu seperti pemilu juga diperhatikan oleh responden (13,3 persen) mengalahkan isu ABRI-Sipil (9,2 persen) dan isu lainnya yang beragam (8,8 persen). Sejumlah 1,5 persen responden tidak memberikan jawaban apa topik menarik yang dibacanya.

Bagnimannakah pendapat responden atas pemberitaan politik di tabloid? Hampir sebagian besar responden berpendapat bahwa berita politik di tabloid lebih banyak bersifat bombastis atau melebih-lebihkan (40,5 persen). Juga, sebanyak 26,5 persen responden menyatakan berita di tabloid berisi gosip/rumor. Meski demikian, jumlah yang cukup besar tetap mengatakan bahwa berita politik di tabloid tergolong akurat, yakni 31,2 persen. Sedangkan 1,8 persen selebihnya tidak menjawab.

Faktor bombastis atau gosip/rumor barangkali akan membuat nilai tabloid menjadi turun.

Akan tetapi tidak demikian adanya, justru sebagian besar responden menyatakan bahwa pemberitaan di tabloid dapat dipercaya (58,6 persen). Mereka yang tidak percaya cukup terpaut jauh, yakni sebesar 31,6 persen. Sedangkan responden lainnya terkesan cenderung ragu-ragu (5,8 persen) dan tidak menyatakan pendapatnya (4 persen).

Hal ini menarik karena tampaknya berita yang bombastis atau pun gosip bukan berarti

mengetahui siapa sebenarnya yang diuntungkan atas pemberitaan politik di tabloid tersebut. Menurut pendapat responden, elit politik dan tabloid itu sendiri yang menempati posisi hampir berimbang, sebagai pihak yang paling diuntungkan, masing-masing yakni 37,6 persen dan 32,7 persen. Rakyat banyak juga diuntungkan, tetapi hanya menduduki posisi ketiga, yakni 28,1 persen. Responden selebihnya, 1,5 persen tidak memberikan jawaban.

Tabel 2. Pihak yang diuntungkan dan pemberitaan politik

Pemberitaan politik di tabloid				
Pihak yang diuntungkan	Akurat	Gosip/Rumors	Bombastis	Total
Elit Politik	58	48	63	169
	13,2%	10,9%	14,3%	38,4%
Rakyat Banyak	64	20	40	124
	14,5%	4,5%	9,1%	28,2%
Media itu Sendiri	17	51	79	147
	3,9%	11,6%	18,0%	33,4%
Total	139	119	182	431
	31,6%	27,6%	41,4%	100%

tidak dapat dipercaya. Atau, barangkali ada faktor lain untuk percaya terhadap pemberitaan di tabloid, yang tidak bergantung pada isi beritanya. Berita yang akurat tentu membuat orang akan percaya. Demikian halnya dengan yang tampak dari jawaban responden (Tabel 1). Sebanyak 29,2 persen yang percaya berita politik di tabloid menganggap karena pemberitaannya akurat. Mereka yang tidak percaya menganggap bahwa gosip/rumor dan bombastis lebih banyak mengisi berita-berita politik di tabloid, yakni 17,4 persen dan 13,9 persen. Meski demikian, cukup besar pula responden yang percaya karena beritanya bombastis 23,2 persen. Dan yang percaya gosip/rumor sebanyak 8,6 persen.

Semakin menarik dengan

Tabel 1. Kepercayaan terhadap tabloid dan pemberitaan politik

Pemberitaan politik di tabloid				
Kepercayaan thd tabloid	Akurat	Gosip/Rumors	Bombastis	Total
Ya	126	37	100	263
	29,2%	8,6%	23,2%	61,0%
Tidak	7	75	60	142
	1,6%	17,4%	13,9%	32,9%
Cenderung ragu-ragu	6	5	15	26
	1,4%	1,1%	3,5%	6,1%
Total	139	117	175	431
	32,3%	27,1%	40,6%	100%

Berkaitan dengan kecenderungan pemberitaan di tabloid, persentase terbesar pendapat responden menunjukkan bahwa tabloid dan elit paling diuntungkan dengan pemberitaan yang bombastis atau lebih-lebihkan (Lihat Tabel 2). Berita-berita yang hanya menekankan akurasi, tanpa lebih-lebihkan, justru paling merugikan tabloid, padahal ini yang paling menguntungkan bagi rakyat banyak. Gosip/rumor menjadi penyebab yang paling merugikan baik bagi rakyat banyak maupun bagi elit politik. Agaknya, kondisi semacam ini yang memungkinkan keberadaan dan produktivitas tabloid terjaga. Dan khalayak seperti tidak punya pilihan lain kecuali menerima dan mempercayainya.

Hal ini tampak cukup ironis karena sebenarnya alasan responden untuk mempercayai berita-berita politik di tabloid adalah karena berita tersebut dianggap memberi keuntungan bagi rakyat banyak, yakni sebanyak 24,4 persen (Tabel 3). Jumlah ini hampir berimbang de-

Tabel 3. Pihak yang diuntungkan dan kepercayaan terhadap tabloid

Kepercayaan terhadap tabloid				
Pihak yang diuntungkan	Percaya	Tidak percaya	Cenderung Ragu	Total
Elit Politik	103 24,0%	47 10,9%	16 3,7%	166 38,6%
Rakyat Banyak	105 24,4%	12 2,8%	4 0,9%	121 28,1%
Media Itu Sendiri	54 12,6%	83 19,3%	6 1,4%	143 33,3%
Total	262 60,9%	142 33,0%	26 6,0%	430 100%

ngan keuntungan untuk elit politik (24 persen), tetapi berbeda jauh dengan keuntungan untuk tabloid itu sendiri, yang hanya 12,6 persen. Responden yang tidak percaya berita politik di tabloid beralasan bahwa berita tersebut hanya menguntungkan tabloid itu sendiri (19,3 persen) dan elit politik (10,9 persen).

Melihat kecenderungan ini, agaknya rakyat masih harus cukup sabar agar kepentingannya dapat optimum terakomoda-

si dan terartikulasi di ruang publik. Jumlah penerbitan pers. dalam hal ini tabloid, telah demikian banyak, namun tampaknya ada kepentingan lain yang lebih diutamakan di ruang publik daripada kepentingan rakyat yang notabene adalah pemilik ruang publik tersebut. Tapi di sisi lain, tabloid dan pemberitaan di tabloid barangkali sudah jenuh.

(Prodi Sosiologi UAJY/
Litbang Bernas)

